

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan merupakan salah satu pintu gerbang untuk masuk ke satu wilayah tertentu dan sebagai penghubung antar daerah, bahkan antar negara kegiatan di pelabuhan membutuhkan berbagai fasilitas dan sarana pendukung. Fasilitas yang di dapatkan di pelabuhan terbagi menjadi dua yaitu fasilitas pokok dan fasilitas penunjang, fasilitas pokok seperti alur pelayaran, kolam labuh, penahanan gelombang dan pelampung tambang, sedangkan fasilitas penunjang yang biasa di sebut suprastruktur seperti dermaga, gudang, lapangan penumpang dan jalan. (Ari Cahyudi, 2021)

Peran penting dan strategis suatu pelabuhan dalam aktivitasnya sangat besar di sumbangkan bagi pertumbuhan industri, ekonomi dan perdagangan serta merupakan bidang usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan bidang usaha pelabuhan agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau. Pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan adalah pelayanan terhadap kapal dan terhadap muatan yaitu barang dan penumpang. (Elfrida Gultom 2017)

Dalam upaya penegakan hukum di laut khususnya yang berkaitan dengan Undang – undang Pelayaran yang dilaksanakan melalui suatu operasi patroli keamanan dan keselamatan laut, baik secara parsial oleh berbagai pengaku kepentingan di laut dan secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh kapal – kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pantai, dan unit pelaksanaan teknis di daerah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan dari hasil patrol keselamatan dan keamanan laut, yaitu kasus kapal yang

memiliki surat persetujuan berlayar yang di keluarkan oleh Syahbandar yang berwenang, namun ketika diadakan pemeriksaan di tenga laut oleh kapal patroli ternyata tidak laik laut. (Undang – undang no.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Balai Kantor Kesehatan Pelabuhan yang disebut (BKKP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi (PK & SE), seksi pengendalian resiko lingkungan (PRL), dan seksi upaya kesehatan dan lintas wilayah (UKLW) dan subbagian tata usaha. Perencanaan kegiatan pemeriksaan kapal dalam karantina yang merupakan program kerja dari substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi sudah memiliki perencanaan yang baik, seperti jumlah tenaga dan alat yang digunakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. SOP yang digunakan adalah SOP tahun 2009 yang kurang relevan dengan kondisi saat ini. Perencanaan kegiatan surveilans epidemiologi di pelabuhan dalam upaya kewaspadaan dini yang merupakan program kerja dari substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologin telah memiliki perencanaan yang baik, seperti jumlah tenaga dan alat yang digunakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kegiatan surveilans. (Muhammad Alfarezi).

Pada Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kegiatan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan diwilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Pelayanan pemeriksaan kapal dalam karantina dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pelayanan pemeriksaan kapal dalam karantina sesuai dengan peraturan yaitu kapal laut yang berasal dari luar negeri dan dari daerah terjangkit suatu penyakit menular yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan

masyarakat.

Balai Kesehatan Pelabuhan mengelola kapal penumpang di jalur Bengkalis-Malaka terkait dengan keamanan karantina adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit menular secara internasional. Kehadiran pelabuhan di Bengkalis, yang menyediakan layanan internasional, terutama menuju Malaka di Malaysia, memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ada beberapa langkah yang biasanya diikuti dalam prosedur ini, seperti: Semua orang yang tiba di Malaka atau yang pergi ke Malaka akan menjalani evaluasi kondisi kesehatan mereka dan akan diawasi. Jika seorang penumpang menunjukkan gejala yang mencurigakan (seperti merasa tidak enak badan, pilek, atau kesulitan bernapas), ia akan diperiksa lebih lanjut. Ketika ada kasus mencurigakan dari patologi menular, mungkin penumpang akan ditempatkan di ruang isolasi atau karantina selama periode tertentu untuk mencegah penyebaran penyakit kepada penumpang lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus ini salah satunya dengan tindakan karantina kesehatan pelabuhan yang ada di Bengkalis ini, pemeriksaan oleh karantina kesehatan terhadap kapal asing yang masuk di pelabuhan dilakukan untuk mencegah potensi masuknya virus ke wilayah pelabuhan Bengkalis, karena setiap pergerakan kapal baik masuk maupun keluar dari pelabuhan ini akan dilakukan pemeriksaan baik kapal, penumpang, barang, maupun awak kapal tersebut. (Muhammad Alfarezi/2022).

Berdasarkan pengalaman penulis melihat kantor balai kekarantinaan kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan di kapal penumpang yang baru sampai di pelabuhan internasional Dumai apakah para penumpang membawa penyakit dari luar negeri yang bisa menyebar luas di Dumai atau I daerah yang di kunjungi atau tidaknya akan di cek oleh petugas yang berwenang, bukan hanya penumpang saja yang di cek kesehatannya tetapi ABK kapal juga di periksa kesehatannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Peran Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis Dalam Penanganan Kapal Penumpang Bengkalis –**

Malaka”. yang mana menurut penulis masalah tersebut sangat layak untuk di angkat menjadi penyelesaian Tugas Akhir dari penulis.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dalam penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dalam penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dalam penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu

1. Sebagai tambahan pengetahuan taruna maupun taruni yang berada di politeknik negeri bengkalis terkhususnya yang untuk jurusan kemaritiman mengenai pelaksanaan penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis
2. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan guna dijadikan bahan acuan untuk referensi penelitian berikutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dalam penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dalam penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka?
3. Apa saja upaya yang harus dilakukan kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dalam penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka?

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi lebih luas maka penulis membatasi masalah pada pelaksanaan penanganan kapal penumpang Bengkalis – Malaka oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Dumai Wilayah Kerja Bengkalis dan kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 1.1 Tinjauan Teori
- 1.2 Studi Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
- 3.2 Teknik Penumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data
- 3.4 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Deskripsi Data
- 4.2 Analisis Data
- 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah
- 4.4 Evaluasi PemecahanMasalah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN